

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2017 - 2019

Melda Mariana Poeh^{1*}, Yeriyanto M. Djami², Daniel M. D. U³, dan Mychael G. Pae⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: poeh_melda@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the financial performance of Sabu Raijua Regency in financial ratios, namely, the ratio of financial independence, the ratio of effectiveness and efficiency, the ratio of harmony and the ratio of growth. In this study the research method used descriptive quantitative research, namely processing the data obtained in the field to provide an analysis of regional financial performance. The place of research was carried out at the Regional Finance Agency of Sabu Raijua Regency. Sources of data used were secondary data sources. Data collection techniques used interviews and documentation. As the data analysis technique, the writer applied performance analysis by measuring the financial ratios of the local government of the Sabu Raijua Regency. Based on the research results, it can be concluded that the financial performance of Sabu Raijua Regency from the calculation of financial ratios was still not good because of the low value of the independence ratio, so it still depends on assistance from the centre. The effectiveness of regional spending was quite good, although the efficiency ratio was still very low. There was no stability between operating expenditure and capital expenditure from the compatibility ratio, so it was not good. The regional growth ratio still has a very low growth rate every year, so it is expected that there will be positive growth every year.

Keywords: Performance measurement, financial performance, financial ratio.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah dapat menimbulkan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah diwajibkan mengatur tersebut guna menciptakan kinerja pemerintah daerah yang mandiri, efektif dan efisiensi, keserasian serta pertumbuhan yang baik. Dalam Mardiasmo (2002), untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, demokratis

dan efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan,. Bentuk kinerja tersebut seperti rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Setelah otonomi daerah diberikan kepada pemerintah provinsi Raijua menjadi salah satu kecamatan dari Kabupaten Sabu Raijua. Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di tahun 2008, secara resmi kabupaten yang terletak di bagian paling selatan Indonesia ini terbagi atas 6 kecamatan yakni Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Liae, Sabu Timur dan Sabu Tengah. Pemekaran yang masih dikatakan baru ini membuat pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua masih belum bisa dikatakan baik. Berlakunya otonomi daerah seharusnya Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua harus berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Kebanyakan kota atau kabupaten kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kerjanya, termasuk Kabupaten Sabu Raijua. Banyak pejabat-pejabat daerah Kabupaten Sabu Raijua yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan penyimpangan

yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah Sabu Raijua. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintahan daerah merupakan aktivitas untuk menggali serta mengelola sumber penerimaan daerah dalam mengatur dan membiayai kegiatan pemerintah daerahnya guna untuk mendukung sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan daerah secara mandiri dengan kebebasan dalam penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undang (Syamsi, 1986). Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah Sabu Raijua dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menggambarkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Data yang diperoleh peneliti mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2019

| Tahun Anggaran dan Realisasi | Anggaran dan Realisasi | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | PAD (Rp) | Total Pendapatan (Rp) | Total Belanja (Rp) |
| 2017 | 47.782.615.776,16 | 536.631.907.056,73 | 637.854.904.221,02 |
| 2018 | 31.139.294.535,86 | 562.919.129.908,86 | 688.667.063.833,91 |
| 2019 | 31.937.211.458,10 | 626.402.705.471,10 | 779.977.460.143,40 |

Data pada tabel menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 536.631.907.056,73, tahun 2018 sebesar Rp 562.919.129.908,86 dan tahun 2019 sebesar Rp 626.402.705.471,10 yang berarti dalam tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Demikian juga realisasi total belanja tahun 2017 sebesar Rp 637.854.904.221,02, tahun 2018 sebesar Rp 688.667.063.833,91, dan tahun 2019 sebesar Rp 779.977.460.143,40 yang berarti dalam tiga tahun berturut-turut mengalami

peningkatan juga. Sedangkan total PAD Kabupaten Sabu Raijua dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 47.782.615.776,16, tahun 2018 sebesar Rp 31.139.294.535,86, dan tahun 2019 sebesar Rp 31.937.211.458,10. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sabu Raijua selama tiga tahun tersebut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Peneliti juga ingin menguji kembali penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah karena masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda (Rahmayati, 2016; Harahap, 2020; Zuhri & Soleh, 2016; Ropa, 2016). Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua beralamat di Jl. Eltari Seba Menia-Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni data non-keuangan berupa gambaran umum dan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah dan data kuantitatif adalah data keuangan berupa data target dan realisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif kuantitatif dengan cara mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah, diukur berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dengan uraian sebagai berikut :

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2012). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan pem pusat/propinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2. Tingkat Kemandirian dan Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) |
|--------------------|-----------------|
| Rendah Sekali | 0% - 25% |
| Rendah | 25% - 50% |
| Sedang | 50% - 75% |
| Tinggi | 75% - 100% |

b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Daerah

1) Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

| Kriteria Efektivitas | Persentase Efektivitas(%) |
|----------------------|---------------------------|
| Sangat Efektif | >100 |
| Efektif | >90-100 |
| Cukup Efektif | >80-90 |
| Kurang Efektif | >60-80 |
| Tidak Efektif | £60 |

2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

| Kriteria Efisiensi | Persentase Efisiensi (%) |
|--------------------|--------------------------|
| Tidak Efisien | 100 keatas |
| Kurang Efisien | 90% - 100% |
| Cukup Efisien | 80% - 90% |
| Efisien | 60% - 80% |
| Sangat Efisien | Kurang dari 60% |

c) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012). rasio keserasian itu diformulasikan sebagai berikut :

1) Rasio Belanja Operasi

$$= \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

$$= \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Keserasian Kinerja Keuangan

| Kriteria Keserasian | Persentase Keserasian(%) |
|---------------------|--------------------------|
| Tidak Baik | 0 – 50 % |
| Baik | 50 – 100 % |

d) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dapat dikatakan baik apabila setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpXn - RpXn - 1}{RpXn - 1} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Pertumbuhan Keuangan

| Kriteria Pertumbuhan | Persentase Pertumbuhan(%) |
|----------------------|---------------------------|
| Rendah | 0 – 25 % |
| Sedang | 25 – 50 % |
| Tinggi | 50 – 100 % |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Sabu Raijua

sebesar Rp 47.782.615.776,16. Mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi Rp 31.139.294.535,86. Pada tahun 2019 PAD Kabupaten Sabu Raijua mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp 31.937.211.458,10.

Perhitungan menunjukkan pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Tahun 2017 sebesar Rp 488.239.395.066,57, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 518.760.715.373,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp 575.892.894.013,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2018 dan 2019. kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua jika dilihat dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2017 sebesar 9,78% dapat dikategorikan rendah sekali berdasarkan dari Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah menurut sumber Kepmendagri No.690.900.327, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 1,66% yang dikategorikan rendah sekali dan tahun 2019 terjadi kenaikan hanya sebesar 0,14% menjadi 1,80% dapat dikategorikan rendah sekali. Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama periode 3 tahun hanya sebesar 4,41% yang dapat dikategorikan rendah sekali. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama tiga tahun pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Hal ini disebabkan Kabupaten Sabu Raijua masih belum baik PAD dalam memaksimalkan PAD atau kekayaan asli daerahnya, baik itu dari potensi laut, pariwisata dan juga kendala transportasi yang belum memadai. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang cukup besar dalam pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Sabu Raijua, sehingga kedepannya perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia guna meningkatkan potensi- potensi PAD atau kekayaan asli daerah yang ada. Hasil perolehan menunjukkan bahwa penurunan dari

tahun sebelumnya membuktikan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat besar dan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua masih sangat rendah melaksanakan otonomi daerah disertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Tabel 7 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2019

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Bantuan Pemerintah Pusat /Provinsi dan Pinjaman | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) |
|---|------------------------|---|---------------------------------------|
| 2017 | 47.782.615.776,16 | 488.239.395.066,57 | 9,78 |
| 2018 | 31.139.294.535,86 | 518.760.715.373,00 | 1,66 |
| 2019 | 31.937.211.458,10 | 575.892.894.013,00 | 1,80 |
| Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | | | 4,41 |

Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi

a) Rasio Efektifitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8 menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Sabu Raijua mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2017 PAD dianggarkan sebesar Rp 49.507.032.669,00. Tahun 2018 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 52.053.909.323,00. Tahun 2019 PAD dianggarkan sebesar Rp 45.452.754.415,00.

Realisasi PAD Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 2017 PAD Kab Sabu Raijua sebesar Rp 47.782.615.776,16 Mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi Rp 31.139.294.535,86. Tahun 2019 PAD Kabupaten Sabu Raijua mengalami kenaikan menjadi Rp 31.937.211.458,10.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua jika dilihat dengan Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2017 sebesar 96,51% dapat dikatakan efektif, berdasarkan dari Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah menurut sumber Kepmendagri No.690.900.327, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 59,82% yang dikatakan masih kurang efektif dan tahun 2019 terjadi kenaikan kembali menjadi 70,26% masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 8 Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Sabu Raijua selama periode tiga tahun kurang efektif karena rata-rata efektivitasnya yaitu 75,53%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kab

Sabu Raijua juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang belum cukup baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Pengelolaan program kerja yang belum baik juga menjadi faktor yang cukup besar juga membuat keefektifan Kabupaten Sabu Raijua menjadi rendah. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua diharapkan lebih memperhatikan program kerja apakah yang ada sudah benar-benar optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kab Sabu Raijua.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2019

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Anggaran PAD (Rp) | Rasio Efektifitas PAD (%) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 2017 | 47.782.615.776,16 | 49.507.032.669,00 | 96,51 |
| 2018 | 31.139.294.535,86 | 52.053.909.323,00 | 59,82 |
| 2019 | 31.937.211.458,10 | 45.452.754.415,00 | 70,26 |
| Rata-Rata Rasio Efektifitas PAD | | | 75,53 |

b) Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9 diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2017 sampai dengan 2019 rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp 449.965.917.491,00, naik menjadi Rp 556.119.022.268,00 pada tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 648.309.628.375,00. Total pendapatan daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2017 sampai dengan 2019 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2017 total pendapatan daerah sebesar Rp 536.631.907.056,73. Mengalami kenaikan sebesar Rp 562.919.129.908,86 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 total pendapatan daerah sebesar Rp 626.402.705.471,10. Hasil perhitungan juga dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua jika dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2017 sebesar 83,85% yang dapat digolongkan cukup efisien, karena interval efisiensinya diantara 80% - 90%. Rasio efisiensi pada tahun 2018 sebesar 98,79% yang dapat digolongkan kurang efisien, karena rasionya melebihi dari 90-100%. Tahun 2019 rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sebesar 103,49% yang dapat digolongkan tidak efisien, karena interval efisiensinya melebihi 100%. Berdasarkan perhitungan pada tabel 9 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 95,37% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar

83,85%, kemudian tahun 2018 menjadi 98,79%. Tahun 2019 sebesar meningkat menjadi 103,49% dan digolongkan tidak efisien. Rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua selama periode tiga tahun, yaitu sebesar 95,37% dapat digolongkan kurang efisien, karena interval efisiensinya diantara 90% - 100%. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam hal ini masih kurang baik karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Faktor penyebab terbesar juga bisa dikarenakan pemerintah hanya sekedar menghabiskan anggaran yang ada tanpa memperhatikan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki nilai efisiensi yang sangat rendah. Kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Pemerintah Sabu Raijua juga diharapkan lebih memperhatikan program kerja yang ada dalam rangka penggunaan anggaran dan SILPA/Surplus, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2017-2019

| Tahun | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Penerimaan PAD | Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%) |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 2017 | 449.965.917.491,00 | 536.631.907.056,73 | 83,85 |
| 2018 | 556.119.022.268,00 | 562.919.129.908,86 | 98,79 |
| 2019 | 648.309.628.375,00 | 626.402.705.471,10 | 103,49 |
| Rata-Rata Rasio Efisiensi PAD | | | 95,37 |

Analisis Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal

a) Rasio Belanja Operasi

Tabel 10. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2019

| Tahun | Total Belanja Operasi Operasi (Rp) | Total Belanja Daerah (Rp) | Rasio Belanja Operasi (%) |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2017 | 355.282.127.939,00 | 449.965.917.491,00 | 78,95 |
| 2018 | 402.590.110.614,00 | 556.119.022.268,00 | 72,39 |
| 2019 | 491.899.397.726,00 | 648.309.628.375,00 | 75,87 |
| Rata-Rata Rasio Belanja Operasi | | | 75,73 |

b) Rasio Belanja Modal

Tabel 11. Perhitungan Rasio Belanja Modal Daerah Kab. Sabu Raijua Tahun 2017-2019

| Tahun | Total Belanja | Total Belanja | Rasio Belanja |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | Modal (Rp) | Daerah (Rp) | Modal (%) |
| 2017 | 94.261.785.071,00 | 449.965.917.491,00 | 20,94 |
| 2018 | 152.978.911.657,00 | 556.119.022.268,00 | 27,50 |
| 2019 | 156.173.945.800,00 | 648.309.628.375,00 | 24,08 |
| Rata-Rata Rasio Belanja Modal | | | 24,17 |

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2017 sampai dengan 2019 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp 449.965.917.491,00, naik menjadi Rp 556.119.022.268,00 pada tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 648.309.628.375,00.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Masing-masing sebesar: Rp 355.282.127.939,00; Rp 402.590.110.614,00; dan Rp 491.899.397.726,00. Sedangkan Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset tetap lainnya, juga mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Masing-masing sebesar: Rp 94.261.785.071,00; Rp 152.978.911.657,00; dan Rp 156.173.945.800,00. Hasil perhitungan juga menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua jika dilihat dari belanja operasi pada tahun 2017 yaitu 78,95%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi 72,39%. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 75,87%. Sedangkan dilihat dari belanja modal pada tahun 2017 yaitu 20,94%, lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 27,50%. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 24,08%. Jadi rata-rata rasio belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua selama 3 tahun periode sebesar 75,73% dan 24,17%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki

Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua kecil atau belum terpenuhi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga perlu mengadakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu sektor pertanian, potensi laut, pariwisata, maupun sektor lainnya. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan public

Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya

Tabel 12 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2019

| Tahun | Jenis Pertumbuhan | RpXn - RpXn - 1 (Rp) | RpXn - 1 (Rp) | Rasio Pertumbuhan(%) |
|-----------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2017 | PAD | 16.343.001.694,74 | 31.439.614.081,42 | 51,98 |
| 2018 | PAD | (16.643.321.240,30) | 47.782.615.776,16 | -34,83 |
| 2019 | PAD | 797.916.922,24 | 31.139.294.535,86 | 2,56 |
| Rata-rata | | | | 6,57 |
| 2017 | Pendapatan Daerah | (20.777.147600,69) | 557.409.054.657,42 | -3,72 |
| 2018 | Pendapatan Daerah | 26.287.222.852,13 | 536.631.907.056,73 | 4,89 |
| 2019 | Pendapatan Daerah | 63.483.575.562,24 | 562.919.129.908,86 | 11,27 |
| Rata-rata | | | | 4,14 |
| 2017 | Belanja Daerah | (139.718.673.586,00) | 589.684.591.077,00 | -23,69 |
| 2018 | Belanja Daerah | 107.499.893.977,00 | 448.619.128.291,00 | 23,96 |
| 2019 | Belanja Daerah | 92.190.606.107,00 | 556.119.022.268,00 | 16,57 |
| Rata-rata | | | | 5,61 |

Berdasarkan perhitungan pada tabel 12 dapat diketahui bahwa total PAD tahun 2017 dikurangi total PAD tahun sebelumnya sebesar

Rp 16.343.001.694,74 dengan total PAD pada tahun sebelumnya sebesar Rp 31.439.614.081,42. Total PAD tahun 2018 dikurangi total PAD tahun sebelumnya menurun drastis menjadi sebesar (Rp 16.643.321.240,30) dengan total PAD pada tahun sebelumnya sebesar Rp 47.782.615.776,16. Kemudian pada tahun 2019 total PAD mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar Rp 797.916.922,24 dengan total PAD sebesar Rp 31.139.294.535,86 pada tahun sebelumnya. Total pendapatan daerah tahun 2017 dikurangi total pendapatan daerah tahun sebelumnya sangat kecil, yaitu sebesar (Rp 20.777.147.600,69) dengan total pendapatan daerah pada tahun sebelumnya sebesar Rp 557.409.054.657,42. Total pendapatan daerah tahun 2018 dikurangi total pendapatan daerah tahun sebelumnya meningkat menjadi sebesar Rp 26.287.222.852,13 dengan total pendapatan daerah pada tahun sebelumnya sebesar Rp 536.631.907.056,73. Kemudian pada tahun 2019 total pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 63.483.575.562,24 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 562.919.129.908,86 pada tahun sebelumnya. Total belanja daerah tahun 2017 dikurangi total belanja daerah tahun sebelumnya sangat kecil, yaitu sebesar (Rp 139.718.673.586,00) dengan total belanja daerah pada tahun sebelumnya sebesar Rp 589.684.591.077,00. Total belanja daerah tahun 2018 dikurangi total belanja daerah tahun sebelumnya meningkat menjadi sebesar Rp 107.499.893.977,00 dengan total belanja daerah pada tahun sebelumnya sebesar Rp 448.619.128.291,00. Kemudian pada tahun 2019 total belanja daerah kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 92.190.606.107,00 dengan total belanja daerah sebesar Rp 556.119.022.268,00 pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2017 cukup tinggi yakni sebesar 51,98% dan dikategorikan sedang, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sangat rendah yakni menjadi -34,83%. Hal ini dikarenakan total PAD tahun 2018 lebih besar daripada total PAD tahun sebelumnya. Tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,56% yang masih dikatakan rendah. Rasio pendapatan daerah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar -3,72% dan dikategorikan sangat rendah, tetapi mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 4,89% menjadi 11,27% meskipun masih tergolong

rendah. Hal ini dikarenakan adanya sedikit peningkatan total realisasi pendapatan daerah pada dua tahun tersebut, meskipun peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh masih tingginya dana pendapatan transfer dari pusat. Sedangkan rasio belanja daerah pada tahun 2017 sangat kecil yaitu -23,69% dan dikategorikan sangat rendah, tetapi mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 23,96% yang masih dikatakan rendah dan mengalami penurunan kembali menjadi 16,57%. Jadi rata-rata rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua selama tahun 2017 sampai dengan 2019 baik itu pertumbuhan PAD, Pendapatan Daerah, maupun Belanja Daerah masih rendah, yaitu sebesar: 6,57%; 4,14%; dan 5,61%.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan keuangan Kabupaten Sabu Raijua masih belum baik karena masih terus mengalami pertumbuhan yang sangat rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi wilayah dan demografi Sabu Raijua yang masih sulit diakses. Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki iklim yang cukup panas sehingga memiliki potensi yang cukup rendah dari sektor pertanian. Transportasi maupun bahan bakar yang masih minim pun menjadi salah satu faktor terbesar rendahnya pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua. Angka persentase yang ditunjukkan dari hasil perhitungan diharapkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat lebih memperhatikan pertumbuhan keuangan daerah dengan upaya meningkatkan realisasi PAD, pendapatan daerah maupun belanja daerah dari tahun sebelumnya. Pemerintah harus lebih mengupayakan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat seperti fasilitas dan transportasi yang memadai, meningkatkan potensi dari sektor yang ada di daerah. Hal ini berguna sebagai acuan dalam menghasilkan pertumbuhan yang positif tiap tahunnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat disimpulkan terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sabu Raijua dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun

2017 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar: 9,78%; 1,66%; dan 1,80%. Kinerja keuangan Kabupaten Sabu Raijua jika ditinjau dari Rasio efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2017 sampai dengan 2019 masih kurang efektif karena rata-rata rasio efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 75,53%. Tahun 2017 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sebesar 96,51% dan berada di kriteria 90%-100%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 59,82% dan Kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 menjadi 70,26%. Sedangkan rasio efisiensi Kabupaten Sabu Raijua 2017 sampai dengan 2019 sebaesar 83,85%; 98,79%; dan 103,49% yang masih tergolong belum efisien. ditinjau dari rasio keserasian keuangan Kabupaten Sabu Raijua adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 75,87%-78,95%, rata-rata sebesar 75,73%, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran 20,94%-27,50%, rata-rata sebesar 24,17% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua masih kurang memperhatikan pembangunan daerah. Dilihat dari rasio pertumbuhan PAD dan belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua 2017 sampai dengan 2019 mengalami naik turun dengan rata-rata rasia pertumbuhan sebesar 6,57% dan 5,61%. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan nilai rasio yang sangat kecil yaitu sebesar -3,72%; 4,89%; dan 11,27%. Dapat disimpulkan pertumbuhan keuangan Kabupaten Sabu Raijua masih sangat rendah.

Secara keseluruhan kinerja keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Sabu Raijua dikatakan masih belum baik, sehingga masih diperlukan perbaikan dan pembenahan dalam upaya meningkatkan kinerjanya agar dapat terus lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia guna meningkatkan potensi-potensi PAD atau kekayaan asli daerah yang ada seperti potensi laut, pariwisata dan transportasi yang lebih memadai, pemerintah daerah diharapkan melakukan peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya, Efisiensi dari pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua

sendiri masih rendah dikarenakan penerimaan PAD masih tergolong kecil, sehingga pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan kekayaan daerah yang ada guna menghasilkan nilai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat menghasilkan nilai efisiensi belanja daerah yang lebih baik. Pemerintah daerah juga perlu pemerintah perlu mengupayakan peningkatan dalam belanja modal sehingga meminimalisir perbedaan keserasian yang begitu besar. Juga diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dari segi pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut menunjukkan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukkan dari hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan guna penyusunan anggaran agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya. Pemerintah harus lebih mengupayakan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat seperti fasilitas dan transportasi yang memadai, meningkatkan potensi dari sektor yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdagri Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Kinerja Keuangan.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik. Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Daerah Sabu Raijua (2021) Laporan Keuangan Tahun 2017 – 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).

Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
<https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.13153>

Syamsi, Ibnu. (1986). *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta : CV Rajawali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>